

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengembangan Desa Wisata

1. Pengertian Pengembangan Desa Wisata

Menurut wikipedia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif atau kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Desa adalah sekelompok keluarga yang mendiami sekelompok rumah dalam suatu tempat/wilayah di luar kota yang memiliki berbagai aktivitas budaya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wisata adalah berpergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain.

Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan/perkampungan yang memiliki potensi wisata meliputi: daya tarik atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan lembaga pengelola.¹ Pitana mengatakan bahwa desa wisata merupakan wilayah pedesaan dengan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa meliputi: struktur, ruang, arsitektur bangunan, pola

¹ Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2013:8-9

kehidupan sosial budaya masyarakat yang menyediakan bagi kebutuhan pokok wisatawan.²

Desa wisata dapat diartikan sebagai suatu tempat atau daerah yang masih terjaga keaslian pedesaannya seperti sosial budaya yang memiliki potensi, produk, pelaku dan akses sehingga dijadikan daerah sebagai tempat tujuan wisata.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pengembangan berasal dari kata kerja yaitu “berkembang” yang berarti: (a) mekar terbuka, (b) menjadikan besar (luas, merata), (c) menjadikan maju (baik, sempurna). Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Jadi, pengembangan desa wisata dapat diartikan sebagai kegiatan menjadikan maju sebuah desa wisata.³

Pearce mengatakan bahwa pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau menunjukkan desa wisata, secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Kemudian menurut Marpaung menyatakan bahwa pengembangan desa wisata adalah suatu proses bagaimana sebuah desa dapat berkembang dan sebagai pusat wisata yang

² Marsono, *Agro Dan Desa Wisata: Profil Desa Wisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Anggota IKAPI, Anggota APPTI, 2019), hal. 7

³ Rifqy Widayuni, Skripsi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal. 53-54

memiliki unsur hiburan dan pendidikan. Sedangkan pengertian pengembangan desa wisata menurut Putra adalah suatu wilayah (desa) yang dapat memanfaatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema.⁴

2. Syarat-Syarat Menjadi Desa Wisata

Daya tarik daerah untuk tujuan wisata akan mampu menarik wisatawan untuk mengunjunginya jika memenuhi syarat-syarat untuk pembangunan daerahnya, Utama dan Junaedi menyatakan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁵

- a. Daya tarik yang dapat disaksikan (*What to see*), hal ini mengisyaratkan bahwa pada daerah harus ada sesuatu yang menjadi daya tarik wisata, atau suatu daerah mestinya mempunyai daya tarik yang khusus dan atraksi budaya yang bisa dijadikan sebagai hiburan bagi wisatawan. Apa yang disaksikan dapat terdiri dari pemandangan alam, kegiatan, kesenian, dan atraksi wisata.
- b. Aktivitas wisata yang dapat dilakukan (*what to do*), hal ini mengisyaratkan bahwa ditempat wisata dapat menyaksikan sesuatu yang menarik, wisatawan juga mesti disediakan fasilitas rekreasi yang

⁴ Istijabatul Aliyah, Galing Yudana, dan Rara Sugiarti, *Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya: Kawasan Wisata Industri Lurik*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020). hal. 20

⁵ I Gusti Bagus R. Utama & I Wayan R. Junaedi, *Membangun Pariwisata Dari Desa: Desa Wisata Blimbingsari Jembrana Bali Usaha Transformasi Ekonomi*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hal. 76-77

bisa membuat para wisatawan betah untuk tinggal lebih lama ditempat tujuan wisata.

- c. Sesuatu yang dapat dibeli (*what to buy*), hal ini mengisyaratkan bahwa tempat tujuan wisata mestinya menyediakan beberapa fasilitas penunjang untuk berbelanja terutama barang suvenir dan kerajinan rakyat yang bisa berfungsi sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan.
- d. Alat transportasi (*How to Arrived*), hal ini mesti mampu dijelaskan bahwa untuk dapat mengunjungi daerah daya tarik tujuan wisata tersebut, kendaraan apa yang digunakan dan berapa lama wisatawan tiba ke tempat tujuan wisata yang akan dituju.
- e. Penginapan (*Where to Stay*), hal ini menunjukkan bagaimana wisatawan akan dapat tinggal untuk sementara selama mereka berlibur. Untuk menunjang keperluan tempat tinggal sementara bagi wisatawan yang berkunjung, daerah tujuan wisata perlu mempersiapkan penginapan-penginapan seperti hotel berbintang atau hotel tidak berbintang dan sejenisnya.

Pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata perlu didukung oleh keberadaan unsur-unsur yang membentuk suatu sistem desa wisata. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut⁶:

⁶ Rara Sugiarti, dkk, *Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Ngawi*, Jurnal Cakra Wisata, Vol. 17, Jilid 2, 2016

- a. Atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya, dan hasil ciptaan manusia, Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik, memiliki keunikan/kekhasan, dan asli/alami.
- b. Jarak tempuh, yaitu jarak dari kawasan wisata utama, khususnya tempat tinggal wisatawan, dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi maupun dari ibukota kabupaten. Di samping itu lokasi sebuah desa wisata juga dipertimbangkan jarak tempuhnya dari tempat-tempat penting seperti bandara, pelabuhan, terminal dan sebagainya.
- c. Besaran desa yaitu menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan gaya dukung kepariwisataan pada suatu desa wisata.
- d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yaitu aspek penting dari suatu desa wisata mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah agama mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
- e. Ketersediaan infrastruktur yang meliputi fasilitas-fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon, dan sebagainya.

Perbedaan masing-masing kriteria tersebut digunakan untuk tujuan yang sama yaitu melihat karakteristik utama suatu pedesaan untuk kemudian menentukan apakah suatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe one day trip, atau tipe tinggal inap.

3. Tujuan Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yaitu:⁷

- a. Desa wisata merupakan objek wisata alternatif sebagai bentuk dukungan program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan.
- b. Menggali potensi desa dengan mengangkat budaya lokal dalam rangka pembangunan masyarakat.
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat sekitar, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa.
- d. Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar gemar pergi ke desa untuk berekreasi.
- e. Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa, sehingga tetap tinggal di desanya tersebut.
- f. Mempercepat proses adaptasi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang.

Menurut Sastrayuda tujuan pengembangan desa wisata adalah:⁸

- a. Mengenal jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
- b. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.

⁷ Ariga Rahmad Safitra dan Fitri Yusman, *Pengaruh Desa Wisata Kandri Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Kelurahan Kandri Kota Semarang*,

⁸ Istijabatul, Galing, dan Rara, *Desa Wisata*, hal. 21

- c. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk-bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya, dan agar mereka mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
 - d. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat, dan
 - e. Mengembangkan produk wisata desa.
4. Prinsip-Prinsip Pengembangan Desa Wisata

Menurut Sastrayuda prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip pengelolaan antara lain:⁹

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat
- b. Menguntungkan masyarakat setempat
- c. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat
- d. Melibatkan masyarakat setempat, dan
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan

Adapun prinsip dasar dari pengembangan desa wisata menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut¹⁰:

⁹ *Ibid*, ... hal. 21

¹⁰ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, *Desa Wisata Sleman: Menjelajah Keindahan dan Kearifan di Kaki Merapi*, (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, 2015)

- a. Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa.
- b. fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, salah satunya bisa bekerja sama atau individu yang memiliki.
- c. Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau sifat atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

5. Komponen Desa Wisata

Secara umum ada dua konsep yang penting dalam komponen desa wisata, yaitu akomodasi dan atraksi.¹¹

a. Akomodasi

Adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.

b. Atraksi

Adalah keseluruhan kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif dalam kegiatan, seperti kursus tari, bahasa, pelatihan kerajinan, dan hal-hal lain yang bersifat spesifik.

Menurut Rifqy komponen desa wisata terdiri dari:¹²

¹¹ Argyo, *Pembangunan Pariwisata*, hal. 125

¹² Rifqy, *Partisipasi Masyarakat*, hal. 57

- a. Keunikan, keaslian, sifat khas
- b. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
- c. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
- d. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Komponen desa wisata terdiri dari:¹³

- a. Memiliki potensi wisata, seni dan budaya khas daerah setempat
- b. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual.
- c. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya
- d. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata
- e. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan

B. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Wazir mengemukakan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Isbandi partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang di

¹³ *Ibid*, hal. 58

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen juga mengemukakan bahwa partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan serta suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terikat, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Yulianthi menjelaskan bahwa masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau dengan kata lain kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya.¹⁵

Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan ikutserta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi setiap program pembangunan,

¹⁴ Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hal. 30

¹⁵ Yulianthi, *Ilmu Sosial, Budaya Dasar*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hal. 75

dan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban terhadap implementasi setiap program pembangunan.¹⁶

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan, keterlibatan, dan peranserta secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang di capai.¹⁷

Penjelasan pengertian “partisipasi masyarakat” yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seseorang atau suatu kelompok untuk berkontribusi secara sukarela dan menggunakan kebebasannya dalam suatu proses program pembangunan yang dimulai dari perencanaan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi.

2. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat

Adapun prinsip-prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Departement For International Development (DFID)* adalah¹⁸:

- a. Cakupan, merupakan semua orang maupun suatu kelompok yang terlibat dari hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

¹⁶ Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan*, hal. 80

¹⁷ Sri Handini, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 24

¹⁸ Siti, dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi*, hal. 31

- b. Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*), Pada dasarnya setiap orang memiliki keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun hubungan tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi, semua orang harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan suatu dialog.
- d. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Poweship*), semua pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominan.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*), semua pihak mempunyai tanggungjawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*), keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama, Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan

yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang berpartisipasi.

Hurairoh memperinci bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:¹⁹

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang soso, pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambungan, dan mulan sambung.

¹⁹ Abu Hurairoh, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan)*, (Bandung: Humaniora, 2011), hal. 116

Sulaiman membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam lima macam, diantaranya:²⁰

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Sedangkan Ndraha membagi bentuk partisipasi menjadi 6 bentuk, yaitu²¹:

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.

²⁰ Sulaiman dalam Abu Hurairoh, *Pengorganisasian dan Pengembangan*, hal. 117

²¹ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 103

- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan memperhatikan ketiga pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dijelaskan di atas, sebenarnya tidak ada perbedaan, karena hal tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama. Salah satu maksud dari pembagian bentuk partisipasi masyarakat adalah untuk menunjukkan luasnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan orang kalau akan berpartisipasi. Dengan kata lain, untuk berpartisipasi sumbangan orang hendaknya jangan dilihat hanya dari jumlah tenaga dan harta benda yang diberikan. Karena kalau partisipasi dibatasi pada sumbangan tenaga dan harta benda saja, berarti mereduksi esensi konsep dasar partisipasi tersebut.

4. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, antara lain sebagai berikut²²:

- a. Memberikan informasi (*information*)

²² Sri, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat*, hal. 28-29

- b. Konsultasi (*consultation*); yang menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlihat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
 - c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*); dalam arti yang memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
 - d. Bertindak bersama (*acting together*); dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlihat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
 - e. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*); dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan
5. Tipe-tipe partisipasi masyarakat

Seorang budayawan Indonesia yang sangat terkenal, Koentjaraningrat dalam buku *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, mengemukakan partisipasi menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda. Tipe partisipasi tersebut adalah:²³

- a. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus

Dalam tipe partisipasi ini, rakyat diajak, dipersuasi, diperintahkan, atau dipaksa oleh berbagai kalangan pemerintah untuk

²³ Abu Hurairoh, *Pengorganisasian dan Pengembangan*, hal. 117

menyumbangkan tenaga dan hartanya bagi proyek-proyek pembangunan yang khusus, yang biasanya bersifat fisik. Jika Masyarakat ikut serta dalam suatu aktivitas berdasarkan atas keyakinan bahwa proyek ini akan bermanfaat baginya, mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar, tanpa mengharapkan upaya tinggi. Sebaliknya, jika mereka diperintah dan dipaksa oleh mereka untuk menyumbangkan tenaga atau harta mereka kepada proyeknya tadi, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat kerja rodi.

- b. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan

Pada tipe partisipasi yang kedua ini, tidak ada proyek aktivitas bersama yang khusus, tetapi ada proyek-proyek pembangunan, biasanya yang tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan suatu partisipasi rakyat atas perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi selalu atas dasar kemauan mereka sendiri.

Dalam konteks itu, Cohen dan Uphoff menjelaskan sifat khas partisipasi. Sifat khas partisipasi dikenal dengan gagasan “prakarsa” (*initiative*) dan prakarsa ini pada suatu pihak datang dari bawah (*bottom up*), pada pihak lain datang dari atas (*top down*). Partisipasi *bootom-up* memungkinkan lebih sering bersifat sukarela dari pada paksaan, sedangkan partisipasi lokal yang *top-down* tindakannya kerap kali

melibatkan beberapa jenis paksaan dan di samping ini ada partisipasi yang didorong melalui imbalan-imbalan tertentu.²⁴

6. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dapat didekati melalui berbagai disiplin keilmuan diantaranya yaitu²⁵:

- a. Dalam konsep psikolog, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar belakangnya yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan yang dirasakan.
- b. Menurut konsep pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan, dalam hal ini respon merupakan fungsi dari manfaat atau *reward* yang dapat diharapkan.
- c. Harapan dalam konsep ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh. Manfaat itu sendiri dapat dibedakan dalam manfaat ekonomi maupun manfaat non ekonomi.

7. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

²⁴ *Ibid*, hal. 118

²⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Banung: Alfabeta, 2013), hal. 94

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan praktik pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu sebagai berikut:²⁶

a. Partisipasi Politik

Tujuannya untuk memengaruhi dan mendudukkan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses pemerintahan.

b. Partisipasi Sosial

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai *beneficiari* pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program. Dengan demikian, partisipasi diletakkan di luar lembaga formal pemerintahan seperti forum warga.

c. Partisipasi Warga

Pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima (objek). Tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

²⁶ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan*, hal. 113

Sementara menurut Najib jika dilihat dari penggunaannya partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi:²⁷

a. Partisipasi sebagai alat

Melalui partisipasi, pemerintah diharapkan mampu menyusun berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga, serta mampu mendorong pengelolaan pemerintahan yang transparan, efektif, bertanggung jawab, dan efisien.

b. Partisipasi sebagai tujuan

Setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan yang diharapkan berdampak pada kehidupannya. Partisipasi merupakan salah satu aspek dari kehidupan bernegara di mana warga memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan serta pengambilan keputusan berbagai kebijakan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini meliputi :

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto²⁸, dengan judul penelitian “Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Tanjung

²⁷ Najib dalam Abu Hurairoh, *Pengorganisasian dan Pengembangan*, hal. 114

²⁸ Dedi Maulia Susanto, *Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018

Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat Desa Tanjung Limau dalam mengembangkan desa wisata. Selain itu juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi selama pembangunan desa wisata tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan penelitian arsip-arsip secara dokumen yang ada pada desa Tanjung Limau, sumber data yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Limau berpartisipasi dalam mengembangkan desa wisata dalam bentuk sumbangan tenaga, keterampilan, harta benda, gagasan pikiran, serta partisipasi sosial. Kemudian Desa Wisata Tanjung Limau sudah memenuhi ciri khas desa wisata seperti something to see, something to do, dan something to buy. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata adalah akses jalan dan jembatan menuju tempat wisata yang rusak dan terbatasnya lahan parkir kendaraan pengunjung sehingga pengembangan desa wisata mengalami kendala serta belum maksimalnya usaha pembuatan amplang untuk dijadikan oleh-oleh khas dari Desa Tanjung Limau. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian ini fokus pada pengembangan ciri khas dari tahun ke tahun serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidiq & Resnawati²⁹, dengan judul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Desa Linggarjati Kabupaten Kuningan Jawa Barat ini menjadi desa wisata yang masih belum melibatkan partisipasi masyarakat, tantangan dalam proses pengembangan desa wisata di Linggarjati adalah dominasi pemerintah dalam keseluruhan proses sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan dan kemauan untuk berpartisipasi penuh. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah tempat penelitian yaitu di Desa Linggarjati Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari, Ristiadi, dan Tonny³⁰, dengan judul penelitian Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Studi Kasus Komunitas Kelurahan Kalimulyo Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi

²⁹ Ade Fajar Sidiq & Risna Resmawaty, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisaya Linggarjati Kuningan Jawa Barat*, Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 4 No. 1,

³⁰ Eva Kurniasari, Ernan Ristiadi dan Fredian Tonny, *Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Studi Kasus Komunitas Kelurahan Kalimulyo Kota Depok*, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol. 5 No. 2, 2013

masyarakat, jenis kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat mendukung ekowisata, serta menganalisis proses kebijakan yang sudah ada terkait dengan pengembangan ekowisata di Kota Depok. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan kuesioner. Sampling dilakukan serta purposive pada 30 responden yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Data kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif serta diuji dengan Chi Square. Dari Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di lokasi penelitian berada pada tangga pertama *non participation* dan tangga kedua *Tokenism* berdasarkan Teori Arnstein, yang bermakna bahwa masyarakat dapat berpendapat seluas-luasnya, namun kesempatan untuk mendapatkan suara dalam menentukan kebijakan masih lemah. Aktivitas sosial dan ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ekowisata di Kota Depok adalah wisata, budidaya tanaman hias dan buah-buahan. Kondisi kebijakan terkait dengan pengembangan ekowisata saat ini belum optimal, program pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan potensi wisata belum dikenal dengan baik oleh masyarakat, beberapa aktor yang berperan dalam pengembangan ekowisata ini adalah pemerintah, masyarakat dan swasta. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian di atas menggunakan tiga metode analisis utama, yaitu Analisis penilaian partisipatif dengan analisis deskriptif terhadap data primer (kuesioner) yang diperoleh melalui responden, pengamatan lapangan, dan wawancara maupun data skunder yang diperoleh dari instansi terkait. Analisis identifikasi usaha produktif dengan analisis statistik deskriptif

terhadap distribusi variabel, kemudian hubungan untuk data yang menggunakan skala nominal dianalisis dengan uji korelasi *Chi-Square*. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk perumusan kebijakan karena kemampuannya dalam memecahkan masalah yang multi kriteria serta fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarki. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Khadiyanto³¹, dengan judul penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata Di Desa Wisata Bejiharjo, Gunungkidul, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola pengelolaan pariwisata oleh masyarakat dan bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata di Kawasan Desa Wisata Bejiharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam prosesnya. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan pariwisata di Desa Bejiharjo sudah melibatkan masyarakat sejak awal inisiasi pengembangan pariwisata adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat membuat kegiatan pengembangan pariwisata dapat berjalan maksimal, sedangkan untuk tingkat partisipasinya disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bejiharjo adalah tingkat kemitraan dimana posisi masyarakat dan pemerintah dalam kewenangan adalah setara, dan

³¹ Farizi Ramadhan dan Parfi Khadiyanto, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata Di Desa Wisata Bejiharjo Gunungkidul Yogyakarta*, Jurnal Teknik PWK, Vol. 3 No. 4, 2014

bentuk partisipasi masyarakat di Desa Bejiharjo sebagian besar berbentuk partisipasi dalam tahap implementasi dengan menjadi tourguide, pengelola pariwisata dan anggota pokdarwis. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah tempat penelitian yaitu di Desa Bejiharjo Gunungkidul, Yogyakarta dan metode penelitian dimana peneliti di atas menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

Penelitian yang dilakukan Wulaningrum³², dengan judul penelitian Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Koripan 1 Dlingo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa obyek wisata Umbul Ndeso dan pelatihan Gunung Pasar, dimana pengembangan tahap awal berupa gazebo, penerangan jalan, dan petunjuk jalan, pelatihan untuk masyarakat terkait dengan peningkatan kualitas hasil pertanian dan lisensi P-IRT, dan pemasaran melalui media online. Program pengembangan kawasan wisata diaman masyarakat Koripan 1 juga membantu membangun desa wisata serta memberikan arahan untuk langkah pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat, aktivitas ini juga memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya kualitas dan lisensi untuk bisnis pengolahan makanan. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti tulis adalah metode pelaksanaannya dimana dalam penelitian di atas memiliki tiga tahapan meliputi tahap perencanaan, tahap implementasi dan tahap pengawasan. Sedangkan

³² Puspita Dewi Wulaningrum, *Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Koripan 1 Dlingo*, Jurnal Berdikari, Vol. 6 No. 2, 2018

persamaannya yaitu sama-sama melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Fandeli, dan Baiquni³³, dengan judul penelitian Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi non-partisipasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Jatiluwih belum melibatkan masyarakat lokal, peranan pemerintah terlihat dominan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah tempat penelitian yaitu di Desa Jatiluwih Kabupaten Tabanan Bali. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Ansar³⁴, dengan judul penelitian Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Community Based Tourism* Pada Kawasan Danau Ranau Lumbok Seminung Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan strategi dan rekomendasi terhadap pengembangan dan pengelolaan desa wisata dikawasan wisata Danau Ranau Lumbok Seminung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

³³ Made Heny U.D, dkk, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali*, Jurnal Kawistara, Vol. 3 No. 2, 2013

³⁴ Dwi Bayu Prasetya dan Zulqadri Ansar, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism Pada Kawasan Danau Ranau Lumbok Seminung Lampung Barat*, Jurnal Plano Madani, Vol. 6 No 1, 2017

ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan jumlah pengunjung perlu adanya peningkatan potensi yang ada seperti peningkatan jumlah wahana, serta adanya peningkatan terhadap potensi lainnya. Kecamatan Lumbok adalah sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, dengan kebijakan pengembangan fungsi kawasan: permukiman, simpul, transportasi danau, pertanian holtikultura, sentra perikanan danau dan pariwisata. Dalam meningkatkan pemasaran, diperlukan strategi pemasaran wisata Danau Ranau di Kecamatan Lumbok diantaranya yaitu *branding*, *advertising*, dan *selling*. Strategi dan pendekatan yang diterapkan di Kawasan Wisata Danau Ranau adalah peningkatan pelayanan seperti peningkatan aksesibilitas, sarana serta prasarana di Kawasan Danau Ranau, melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar serta melakukan kerjasama dan pengawasan dengan masyarakat sekitar. Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah bahwa penelitian di atas fokus pada memberikan masukan strategi dan rekomendasi terhadap pengembangan dan pengelolaan desa wisata Danau Ranau.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitari dan Ma'rif³⁵, dengan judul penelitian Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Lokal. Penelitian bertujuan untuk

³⁵ Yessi Fitari dan Samsul Ma'rif, *Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Masyarakat Lokal*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol. 5 No. 1, 2017

mengetahui manfaat pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lokal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif melalui analisis komponen produk desa wisata untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam pengembangan produk wisata Wonolopo dan analisis Anova untuk mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadi karena adanya Desa Wisata. Dari Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata wonolopo cukup memberi manfaat dibidang sosial, ekonomi mauun lingkungan. Dibidang sosial, potensi kesenian semakin dilestarikan dan menjadi ke khasan lokal, adanya peningkatan keterampilan yang dimiliki masyarakat dan partisipasi masyarakat lokal. Dibidang ekonomi, potensi lokal yang awalnya tidak dimanfaatkan kini dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat dan peluang usaha bagi masyarakat semakin tinggi. Dibidang lingkungan, keberadaan desa wisata mendorong peningkatan kondisi infrastruktur dan aksesibilitas. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah metode yang gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif melalui analisis komponen produk desa wisata untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan produk wisata wonolopo dan analisis Anova untuk mengetahui ada tidaknya peruabahan yang terjadi karena adanya desa wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Herdiana³⁶, dengan judul penelitian Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. hasil

³⁶ Dian, *Peran masyarakat, 2019*

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pariwisata desa akan berhasil jika masyarakat sedang terlibat dalam seluruh proses. Komunitas harus ditempatkan dalam dua peran diantaranya, yaitu komunitas sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah pengembangan pariwisata desa. Kedua, komunitas sebagai objek dimana tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas di desa wisata pengembangan. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian di atas merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, laman web dan referensi lainnya yang dianggap relevan. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlia S³⁷, dengan judul penelitian Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism-CBT) Di Desa Sukajadi Kecamatan Carita. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menggunakan strategi pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara, serta observasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata

³⁷ N. Erna Maria Susfenti, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism-CBT) Di Desa Sukajadi Kecamatan Carita*, Jurnal, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

terlihat masih dominan, padahal bila mengacu pada tata kelola kota pemerintah seharusnya hanya menjadi fasilitator, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan diserahkan kepada masyarakat. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism-CBT) sangat perlu sekali diterapkan agar masyarakat merasakan dan mendapatkan manfaat dari adanya desa wisata. Dengan adanya CBT ini masyarakat tidak lagi khawatir akan tersaingi oleh investor asing karena dalam CBT masyarakat sepenuhnya dilibatkan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. CBT juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas wisata desa Sukajadi ini. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian terdahulu adalah tempat wisata yaitu di Desa Sukajadi Kabupaten Pandeglang. Sedangkan persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama mengkaji sejauhmana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menggunakan strategi pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal.